



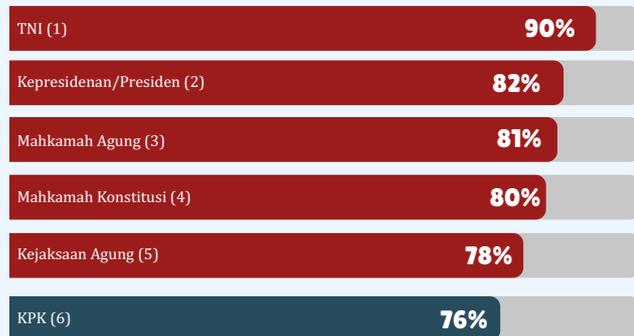
KPK TERSANDERA ULAH PEGAWAI 'NAKAL'

USAI PULUHAN ORANG TERSERET PUNGLI, MENCUAT DUGAAN PELECEHAN VERBAL

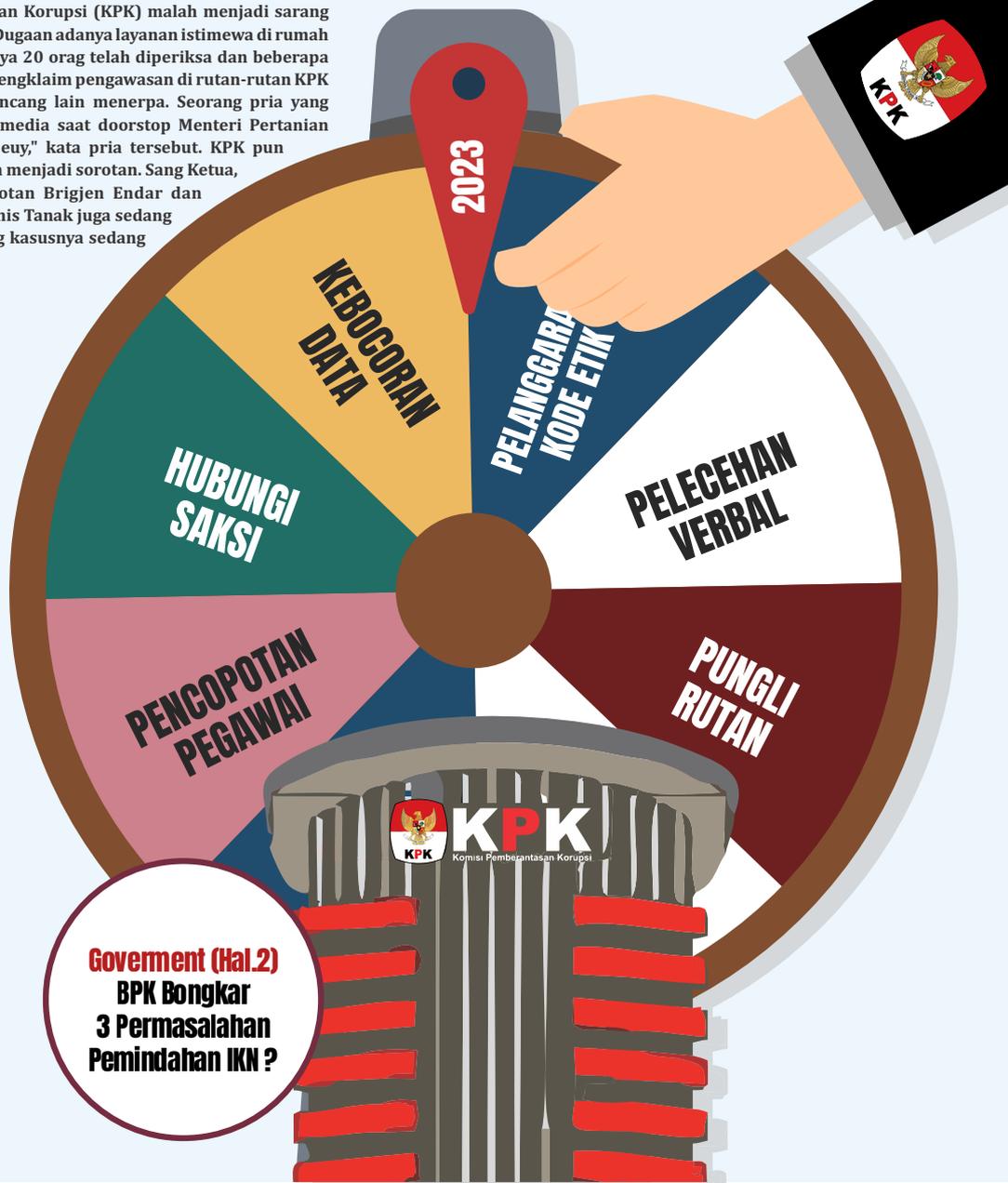
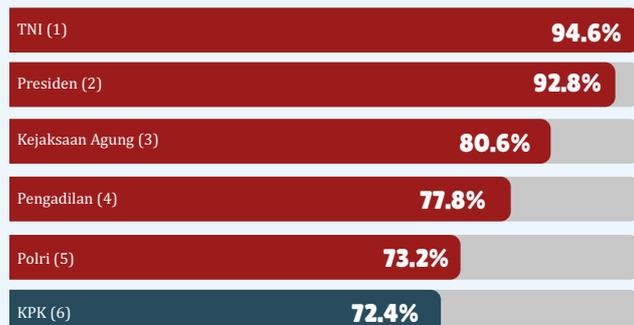
Tak elok sebenarnya seuah lembaga sekaliber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah menjadi sarang pungutan liar (pungli). Namun demikian lah kenyataan yang terjadi. Dugaan adanya layanan istimewa di rumah tahana (rutan) komisi anti-rasuah tersebut tengah diusut. Sedikitnya 20 orag telah diperiksa dan beberapa pegawai pun telah diganti. Namun, lembaga yang dipimpin Firli Bahuri ini mengklaim pengawasan di rutan-rutan KPK sedianya telah dilakukan secara ketat. Belum usai satu badai, angin kencang lain menerpa. Seorang pria yang merupakan pegawai KPK diduga melakukan pelecehan verbal ke awak media saat doorstop Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Terlontar kalimat, "Cewek semua, enak euy," kata pria tersebut. KPK pun menyampaikan permintaan maaf. Ironi. Sebelumnya para petinggi KPK juga menjadi sorotan. Sang Ketua, Firli yang dilaporkan atas dua dugaan pelanggaran etik--soal pencopotan Brigjen Endar dan kebocoran data ESDM--dinyatakan 'bersih'. Terbaru, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga sedang terlibat kasus dugaan pelanggaran etik. Ia diduga menghubungi saksi yang kasusnya sedang diusut oleh KPK. Duh!

(Baca Hal 11)

5 LEMBAGA DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERTINGGI (CHARTA POLITIKA 2-7 MEI 2023)



5 LEMBAGA DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERTINGGI (INDIKATOR POLITIK 11-17 APRIL 2023)



Government (Hal.2)
BPK Bongkar
3 Permasalahan
Pemindahan IKN ?

Utang Lapindo Jatuh Tempo Belum Lunasi Rp 2 T ke Negara

JAKARTA - Utang dana talangan penanganan masalah lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur yang dilakukan PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ) milik keluarga Bakrie belum juga selesai. Padahal utang tersebut sudah jatuh tempo sejak 10 Juli 2019.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan permasalahan utang Lapindo sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang Jakarta. "(Soal Lapindo) kita serahkan ke PUPN sehingga nanti PUPN cabang Jakarta itu akan memanggil sesuai dengan kewenangan dari PUPN," kata Rio dalam media briefing di Kantor DJKN, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

Berdasarkan data, per 31 Desember 2020 utang LMJ ke negara mencapai Rp 2 triliun lebih tepatnya Rp 2.233.941.033.474. Jumlah itu termasuk pokok, bunga dan denda yang harus dibayar. "Jumlahnya Rp 2 triliun something, aku nggak ingat angkanya tapi setelah kita surat-menyurat, dalam surat-menyurat itu kita tagih, yang bersangkutan menyampaikan dalilnya," ucapnya.

Utang terkait Lapindo yang melilit keluarga Bakrie ini berawal pada Maret 2007. Saat itu pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana Lumpur Lapindo melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

Pada saat itu perusahaan Bakrie memperoleh pinjaman Rp 781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp 773,8 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%.

Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1.000 per hari dari nilai pinjaman. Kala perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil empat kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada 2019 lalu.

Nyatanya hingga saat jatuh tempo, Lapindo baru mencicil satu kali dengan besaran Rp 5 miliar dari total utang Rp 773,8 miliar tersebut. Sampai saat ini belum ada pembayaran lanjutan sehingga utangnya makin bertambah karena denda terus berjalan.

Rio pernah menyebut pihak LMJ sudah meminta agar aset yang bersangkutan disita untuk melunasi utangnya. Meski begitu, pihaknya lebih memilih agar pembayaran utang dilakukan secara tunai, bukan aset. "Pihak yang bersangkutan me-nyatakan bahwa tolong diambil tanahnya, nah kami di DJKN tidak serta merta seperti itu, betul ada perjanjian yang mengatakan itu jaminan, tapi yang diutamakan adalah pembayaran-nya," beber Rio dalam bincang bareng DJKN secara virtual, Jumat (28/1/2022).



Pada 29 Mei 2006, muncullah semburan lumpur pertama di lokasi pengeboran Lapindo yang akhirnya memicu sekitar 25 ribu orang kehilangan tempat tinggal karena tenggelam. (Dok.ist)

Kejar Penyelesaian Tutut hingga Tommy

Di sisi lain Kementerian Keuangan mengungkapkan, sudah bertemu dengan pihak perwakilan Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut terkait piutang negara yang belum dibayar. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menjelaskan, 3 anak perusahaan Mbak Tutut, yakni PT Citra Bhakti Margatama Persada, PT Citra Matarang Satriamarga Persada, dan PT MargaNurindoBakti, tercatat masih memiliki utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai kurang lebih Rp 700 miliar.

Rionald menjelaskan, sudah melakukan pemanggilan kepada Bu Tutut, dan yang datang adalah kuasa hukumnya. Namun hasil pertemuan tersebut diakui Rionald belum ada kesepakatan apapun. "Sudah lakukan pemanggilan kepada Bu Rukmana, yang datang kuasa hukum. Namun, belum ada kesepakatan," jelas Rionald saat ditemui di kantornya, Selasa (20/6/2023).

Sementara terkait dengan aset Tommy Soeharto diakui hingga kini tidak laku dalam lelang barang sitaan. Menurutnya, Satgas BLBI tidak akan menyerah dan akan melakukan pelelangan lagi.

Tommy mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian harga. Dia yakin aset ini bisa laku terjual.

"Sekitar tanah 20 hektar dan berdasarkan nilainya mencapai hampir Rp 2 triliun dan akan lakukan pelelangan lagi, tentu nanti penilaiannya akan melihat dari hasil lelang sebelumnya," kata Rionald.

Dia menyadari tidak mudah mendapatkan pihak yang mau membeli parsel tanah seluas itu. Namun, lelang akan terus dilakukan. "Jadi kita akan melakukan lelang lagi," tegasnya. Adapun, Satgas tidak akan memeger penjualan tanah seluas 20 hektar tersebut. Jika dipecah, maka

akan membutuhkan waktu lelang yang lebih lama lagi.

Dengan demikian, pemerintah memutuskan untuk melakukan lelang dengan penyesuaian harga. Upaya melelang aset-aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto masih terus dilakukan Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Ini karena aset-aset tersebut tak kunjung laku setelah dilelang sebanyak tiga kali sejak awal tahun lalu.

Dari data Satgas BLBI, utang Tommy ke negara dilakukan melalui PT Timor Putera Nasional (TPN) saat terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998 silam. Nilai utang tersebut mencapai Rp 2,61 triliun, setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. Piutang ini sesuai PJPNC-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.

Aset Tommy juga mengalami penurunan penawaran selama pelelangan. Semula bernilai Rp 2,425 triliun. Lalu pada lelang selanjutnya diturunkan menjadi Rp 2,151 triliun. Setelah dua kali tidak laku, aset ditawarkan seharga Rp 2,064 triliun.

Sementara itu, limit jaminan juga berubah, sebelumnya Rp 1 triliun menjadi Rp 430 miliar dan terakhir turun lagi menjadi Rp 420 miliar. Satgas BLBI membuka opsi pelelangan terhadap aset itu tak lagi dalam satu paket, melainkan terpisah.

Pun, kata Rionald, pihak Mbak Tutut tidak memberikan jaminan apapun ke negara dalam memenuhi pe-lunasan utangnya. Namun, harta kekayaan lainnya, sedang ditelusuri. "Tiga perusahaan ini tidak ada jaminan dan harta kekayaan lainnya masih ditelusuri. Sebagaimana debitur lain, akan kita lihat dan masih ditelusuri," jelas Rionald lagi.

Seperti diketahui, nama Tutut masuk dalam daftar pengutang BLBI,

yang saat ini menjadi prioritas penanganan Satgas BLBI. Hal itu terungkap dari dokumen penanganan hak tagih negara BLBI tertanggal 15 April 2021.

Tutut tercatat mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Matarang Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, PT Citra Bhakti Margatama Persada. Secara rinci utang Tutut kepada negara berasal dari PT Citra Matarang Satriamarga sebesar Rp 191,61 miliar. Utang ini belum pernah diangsur sama sekali.

Pengurusan utang didaftarkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V pada 2013. Pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa.

Tidak hanya itu utang juga berasal dari PT Marga Nurindo Bhakti senilai Rp 471,47 miliar. Utang ini pernah diangsur sekitar Rp 1,09 miliar. Pengurusan utang juga didaftarkan di KPKNL Jakarta V pada 2010, dimana pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa.

Terakhir utang juga berasal dari PT Citra Bhakti Margatama Persada sebesar Rp 14,79 miliar dan US\$ 6,51 juta. Pengurusan utang didaftarkan di KPKNL Jakarta V pada 2010 dengan pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. (wid,rls, keu,kum/dya)

JEJAK UTANG LAPINDO

- Per 31 Desember 2020 utang LMJ ke negara mencapai Rp 2 triliun lebih tepatnya Rp 2.233.941.033.474. Jumlah itu termasuk pokok, bunga dan denda yang harus dibayar.
- Utang terkait Lapindo yang melilit keluarga Bakrie ini berawal pada Maret 2007. Saat itu pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana Lumpur Lapindo melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
- Pada saat itu perusahaan Bakrie memperoleh pinjaman Rp 781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp 773,8 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%.
- Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1.000 per hari dari nilai pinjaman. Kala perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil empat kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada 2019 lalu.
- Nyatanya hingga saat jatuh tempo 10 Juli 2019, Lapindo baru mencicil satu kali dengan besaran Rp 5 miliar dari total utang Rp 773,8 miliar tersebut. Sampai saat ini belum ada pembayaran lanjutan sehingga utangnya makin bertambah karena denda terus berjalan.

Alotnya Pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Kesehatan, Kenapa?



Ketua DPR RI Puan Maharani usai Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023). (Antara)

JAKARTA-Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Kesehatan dinilai alot (sulit segera terwujud). Bahkan, Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Perampasan Aset yang dikirim sejak 4 Mei 2023 tak kunjung dibacakan pada rapat paripurna DPR RI.

"Kami menyadari hal tersebut urgen, kami juga menyepakati bahwa hal itu harus segera diselesaikan," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023). "Namun, juga masukan dan tanggapan dari masyarakat, kemudian hal-hal lain yang harus kami cermati juga itu menjadi sangat penting," sambung dia.

Ia meminta semua pihak untuk bersabar. Puan tak ingin proses pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa. "Jadi jangan melakukan satu pembahasan itu dengan terburu-buru, kemudian enggak sabar, kemudian hasilnya enggak maksimal," tuturnya.

Diungkapkan, pengesahan dua RUU itu perlu mengikuti mekanisme terkait tata tertib peraturan perundang-undangan untuk bisa disahkan dalam rapat paripurna. Sehingga, kedua RUU tersebut belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Posisi RUU Perampasan Aset saat ini tengah dalam pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI. Sementara RUU Kesehatan yang telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi IX DPR untuk dibawa ke rapat paripurna DPR agar segera mendapatkan pengesahan (Pembicaraan Tingkat II).

Keputusan ini diambil usai membacakan pendapat akhir mini fraksi dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/6/2023).

"Tentu saja ada mekanismenya yang di DPR harus dilakukan jadi enggak bisa sak det sak nyet (buru-buru) kalau kata orang Jawa. Hari ini

ada berita, hari ini sepertinya suratnya ada kemudian itu harus (disahkan di Rapat Paripurna). Karena memang ada mekanisme mekanisme yang harus dijalankan," kata Puan.

"Sehingga, hal tersebut nantinya kalau kemudian berjalan di lapangan itu memang sudah sesuai dengan aturan mekanisme yang tata tertib dan lain-lain yang berjalan di DPR," sambung dia.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, DPR dan pemerintah saat ini tengah fokus membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 ataupun urusan anggaran tahun 2023 lainnya. "Jadi, memang itu dulu yang menjadi fokus pembahasan karena sudah ada siklus penjadwalan untuk permasalahan anggaran ini," ucap Puan.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan, terhambatnya pembacaan Surpres RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna disebabkan proses politik yang belum selesai di antara fraksi-fraksi partai politik (parpol) parlemen. "Itu kan ada proses secara politik di antar fraksi, itu kan masih berjalan gitu loh. Sehingga mereka setelah bulat, baru sampai ke kami-kami pimpinan itu," ucap dia.

Diketahui sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI dari Komisi III pernah mendesak pemerintah untuk mengirimkan surpres, naskah akademik, dan draf RUU Perampasan Aset. Pasalnya, baleid itu merupakan inisiatif dari pemerintah. Sejumlah anggota Komisi III DPR RI, seperti Arsul Sani dan Hinca Panjaitan tak ingin para anggota dewan yang dianggap tak mau membahas baleid tersebut.

Adapun, mencuatnya isu soal pengesahan RUU Perampasan Aset digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat rapat dengan Komisi III DPR RI, 29 Maret 2023. Kala itu, Mahfud meminta Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul untuk

mendukung pengesahan baleid itu. Alasannya, UU Perampasan Aset bakal mempermudah pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, RUU Perampasan Aset bakal berlangsung alot dan panjang. Bambang Pacul juga meyakini para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pasti akan menyatakan sikap terkait RUU tersebut. "Alot. Panjang dan alot. Makanya saya ngomong dulu, karena ini panjang dan alot. Yang namanya UU ini, ketum pasti akan bicara. Ketum-ketum partai pasti akan bicara," ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah masih terus menunggu RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana diproses DPR RI. "Kita menunggu dari DPR. Nanti kan (DPR) mengundang. Kan (surat presiden soal RUU Perampasan Aset) sudah diserahkan," kata Yasonna usai acara Paralegal Justice Award Kementerian Hukum dan HAM pekan lalu.

Oleh karenanya, Yasonna mengaku belum dapat bicara banyak soal teknis kelembagaan terkait perampasan aset nantinya. Menurutnya, hal itu akan menjadi bagian dari dinamika pembahasan di parlemen. "Itu (lembaga pengelola aset) nanti kita bahas. Nanti saja itu," ujar politikus PDI-P tersebut.

Demokrat Minta Penundaan

Terpisah, Anggota DPR Herman Khaeron mengatakan, Fraksi Demokrat meminta penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law, yang sudah diputuskan ditingkat pertama.

"Demokrat bukan menolak RUU kesehatan, karena sejak awal dari badan legislasi, kami sudah menyetujui," katanya dalam diskusi forum legislasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Antara, Selasa (20/6/2023).

Herman yang juga anggota Badan Legislasi DPR itu menegaskan kembali, Fraksi Demokrat menolak untuk segera mengesahkan dalam pengambilan keputusan tingkat dua atau rapat paripurna DPR, karena masih banyak hal penting yang perlu dibahas kembali.

Dia berharap publik juga membutuhkan penjelasan yang rinci terkait beberapa persoalan dalam RUU kesehatan. Dia mencontohkan terkait liberalisasi sektor kesehatan, investasi bisa masuk hingga peningkatan pendapatan nasional. "Supaya DPR itu benar mewakili keinginan rakyat, bukan keinginan pemerintah," ucapnya.

Dia menjelaskan kesehatan merupakan hak asasi manusia. Se-

bagai hak dasar seharusnya mendapatkan ruang yang lebih terbuka, untuk menerima masukan dari masyarakat, pakar dan para ahli di bidang tersebut. "Meski sudah diputuskan pada tingkat satu, mestinya dibuka kembali untuk mendapatkan masukan dari publik," harapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law akan diambil keputusan tingkat II untuk menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Masa Persidangan DPR saat ini.

"Insya Allah pada Masa Sidang ini akan segera diambil keputusan tingkat II-nya pada waktu yang tepat," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Puan menyebut pihaknya akan menindaklanjuti dan mencermati RUU Kesehatan yang telah diambil persetujuan dalam pembicaraan tingkat I pada rapat kerja Komisi IX DPR RI, Senin (19/6). "Alhamdulillah di tingkat I sudah diputuskan," ucapnya.

Meski, lanjut dia, ada dua dari sembilan fraksi DPR RI yang menolak untuk meneruskan pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap RUU kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR RI. (wid,rls,ist/dya)

PERJALANAN RUU PERAMPASAN ASET

- 2008**
PPATK usulkan RUU Perampasan Aset
- 2010**
Rampung dibahas antar kementerian
- 2011**
Diserahkan Kepada Presiden
- 2012**
Naskah akademik disusun BPHN
- 2015**
Masuk Prolegnas jangka menengah 2015-2019
- 2019**
- Diusulkan kepada DPR
- Tertunda akibat pergantian Keanggotaan
- 2020**
Masuk Prolegnas jangka menengah 2020-2024
- 2021**
Tidak masuk Prolegnas Prioritas 2021 dan 2022
- 2022**
Disetujui masuk Prolegnas Prioritas 2023
- 2023**
Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Perampasan Aset dikirim sejak 4 Mei 2023

Kasubag di Setwan Terima THR dari Ketua DPRD Jatim Rp 100 Juta



Azinal Afif Subeki selesai memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Merdeka.com/Erwin Yohanes)

SURABAYA – Pengakuan mengejutkan disampaikan Zaenal Afif Subeki, mantan Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD (Setwan) DPRD Jatim. Dia mengaku menerima THR hingga ratusan juta dari pimpinan dan anggota DPRD Jatim. Bahkan, dia mengaku menerima THR Rp 100 juta dari Ketua DPRD Jatim.

Pengakuan tersebut muncul saat Afif menjadi saksi dalam sidang dugaan suap dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surabaya, Selasa (20/6/2023). Sidang dipimpin Ketua Majelis Dewa Suardita dengan Hakim anggota Arwana dan Darwin.

Dalam kesaksiannya itu, Afif mengaku bahwa total THR yang dia dapat dari pimpinan dan anggota dewan mencapai Rp 700 hingga 800 juta. Pengakuan itu muncul saat Afif menjawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto terkait temuan uang Rp 1,4 miliar oleh KPK saat menggeledah di rumah saksi di daerah Sambikerep, Surabaya pada 20 Desember 2022 lalu.

JPU Arif Suhermanto mencecarnya terkait asal usul uang tunai Rp1,4 miliar tersebut. Dikutip dari Merdeka.com, saat mendapat pertanyaan tersebut, Afif sempat berbelit-belit, namun pada akhirnya Afif pun mengakui jika uang tersebut merupakan hasil pemberian THR dari sejumlah anggota DPRD Jatim.

Awalnya, JPU Arif Suhermanto bertanya mengenai barang apa saja yang disita KPK dari ruang kerjanya di DPRD Jatim. Afif pun mengakui jika hanya laptop dan handphonenya saja yang diambil penyidik. "Laptop sama HP yang disita," ujarnya.

Namun, pada akhirnya Afif pun membenarkan bahwa rumahnya

pernah digeledah KPK dan menyebut ada sejumlah uang yang turut disita dalam penggeledahan tersebut. Dia mengatakan uang tersebut milik istrinya yang disimpan di dalam laci. Uang Rp 1,4 miliar tersebut berupa pecahan rupiah dan satu lembar uang USD100.

JPU kembali mencecar pertanyaan mengenai asal-usul uang tersebut. Afif awalnya dia mengelak dan mengaku tidak mengetahui asal usul uang itu meski ditemukan di dalam rumahnya. Dia menyebut bahwa uang itu adalah milik istrinya, sehingga dia tidak mengetahui persis dari mana asal uang sebanyak itu.

"Saya tidak tahu (asal uang). Meski satu rumah tapi saya tidak pernah membuka-buka laci istri saya," jawabnya dikutip dari merdeka.com.

Menanggapi kejanggalan ini, JPU pun mempertanyakan jumlah gaji Afif dan istrinya yang sama-sama berstatus ASN. Atas pertanyaan itu, Afif pun menjawab jika ia mengantongi total Rp27 juta dalam sebulan. Sementara sang istri yang merupakan ASN Pemprov Jatim bergaji total Rp12 juta saja. "Menurut saya, itu uang gaji saya dan istri, serta dari usaha kami, usaha sekrup," tandasnya.

Jawaban ini pun memantik JPU untuk bertanya apakah ia pernah melaporkan uang tersebut dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)? Dengan tegas, Afif menjawab tidak. JPU kembali mencecar pertanyaan. "Kenapa tidak?," tanya jaksa.

Pertanyaan itu membuat Afif sempat kebingungan menjawabnya. "Tanah, warisan satu sama rumah, (uang?) Tidak ada," akunya.

Saat didesak dengan berbagai pertanyaan, Afif pun akhirnya keceplosan jika ia telah menerima sejumlah uang dari anggota DPRD

Jatim. "E e iya itu uang THR dari anggota dewan, biasanya kalau puasa sampai menjelang lebaran saya dipanggil para anggota dewan dan dikasih THR," ujar Afif dikutip dari beritajatim.

Uang dengan nilai bervariasi itu, diakuinya sebagai pemberian THR (tunjangan hari raya). Nilainya berbeda setiap tahun. Namun, ia mengakui pernah menerima uang THR dari Ketua DPRD Jatim Kusnadi sebesar Rp100 juta. "Paling besar pernah dari Pak Kusnadi sebanyak Rp100 juta," tegasnya.

Selain Kusnadi, ia juga mengakui pernah menerima uang THR dari pimpinan Dewan lainnya serta anggota maupun fraksi di DPRD Jatim. Uang yang diterimanya mulai dari Rp10 juta hingga Rp30 juta. "Kalau anggota dewan seperti pak Sahat ini Rp 10 juta, kalau pak Kusnadi Rp 100 juta," ujar Afif yang disambut suara gemuruh pengujung sidang.

Apakah uang Rp1,4 miliar yang disita dari rumahnya termasuk pemberian anggota Dewan? Ia pun akhirnya mengakui sebagian uang itu dirasanya bagian dari uang THR yang diberikan anggota Dewan. Afif juga menjelaskan, selama kurun waktu 2019 sampai 2023 uang THR tersebut bisa terkumpul mencapai Rp 700-800 juta. "Kira-kira Rp700 sampai Rp800 jutaan. Lainnya gaji saya dan istri," ungkapnya.

Saat ditanya apakah ia mengerti tentang arti gratifikasi? Sekali lagi, Afif terlibat gelagapan, lantas dia menjawab tidak tahu. Namun ia mengakui pernah mendengar kata tersebut.

"Anda tahu gratifikasi?" tanya JPU Arif.

"Mmm.. tidak, ya...pernah tahu," katanya.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dengan dua pasal berlapis. Dalam sidang perdana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (23/5/2023), Sahat juga diduga sudah menerima uang senilai Rp39,5 Miliar.

JPU KPK, Arif Suhermanto, mengatakan Sahat terbukti telah menerima suap dana hibah dari dua terdakwa sebelumnya yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pengelola kelompok masyarakat (pokmas).

"Perbuatan terdakwa Sahat Tua Simandjuntak mengetahui atau setidaknya dapat menduga uang senilai Rp39,5 miliar yang telah

diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan sebagai anggota DPRD Jawa Timur, yang dianggap dapat memberi jatah alokasi dana hibah pokir dari APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2020-2022," kata Jaksa Arif dalam dakwaannya.

Sementara, pasal yang didakwakan pada Sahat yaitu terkait tindak korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kemudian dakwaan kedua terkait suap, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini, jaksa menyebut Sahat menerima suap itu sebagai kompensasi untuk memuluskan pencairan dana hibah yang nantinya akan diterima oleh kelompok masyarakat (Pokmas) tersebut. Setelah mendengar dakwaan itu, Sahat maupun kuasa hukumnya menerima dakwaan tersebut. (lut/dya)



Perbuatan terdakwa Sahat Tua Simandjuntak mengetahui atau setidaknya dapat menduga uang senilai Rp39,5 miliar yang telah diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan sebagai anggota DPRD Jawa Timur, yang dianggap dapat memberi jatah alokasi dana hibah pokir dari APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2020-2022,"

ARIF SUHERMANTO
JPU KPK



Lantik Enam Kepala OPD, Gubernur Khofifah Minta Langsung Tancap Gas



Prosesi pelantikan enam kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahasdi, Selasa (20/6/2023) malam.

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melantik enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Negara Grahasdi, Selasa (20/6/2023) malam. Gubernur meminta supaya mereka langsung lari kencang dan tancap gas untuk melakukan transformasi.

Keenam pejabat yang dilantik tersebut yaitu Aris Agung Paewai sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Sebelumnya dia menjabat sebagai kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM); Ali Kuncoro sebagai kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan; Pulung Caesar sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan yang sebelumnya sebagai Kepala

Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kemudian, Restu Novi Widiani sebagai Kepala Dinas Sosial Jatim, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan; Ramliyanto sebagai Kepala BPSDM yang sebelumnya menjabat Biro Organisasi Setdaprov Jatim; dan dr Fauzan sebagai Wakil Direktur RSUD Saiful Anwar Malang.

“Malam hari ini baru saja kita bersama-sama menghadiri mengikuti sekaligus mendoakan saudara saudara kita yang baru saja dilantik pada pos baru. Mudah mudahan mereka semuanya bisa menjalankan tugas dengan amanah, dengan akuntabilitas yang tinggi, dan mudah mudahan Allah membukakan semua pintu ke-

mudahan, kelancaran, dan manfaat barokah,” kata Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan itu, dia menekankan pada para pejabat yang baru dilantik untuk langsung tancap gas. Kepada Kepala Dinas Pendidikan, dia menekankan bahwa ada hal yang memang harus langsung lari kencang seiring dengan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Di mana orang tua memberikan harapan luar biasa terhadap proses PPDB yang semuanya tentu berharap anaknya masuk padahal secara prosentatif tidak cukup. Ada problem zonasi ada PIN yang belum keluar dan proses yang dilakukan dinas pendidikan sudah sangat luar biasa. Saya tadi hadir bagaimana memberikan solusi tuntas di tempat,” tandasnya.

Dia juga mengatakan bahwa proses PPBD baru berlangsung di tahap satu. Sedangkan PPDB ini ada lima tahap. Oleh karena itu, Khofifah minta Dinas Pendidikan langsung tancap gas, bahkan dia yakin pejabat baru ini tidak perlu proses adaptasi yang lama, karena pada dasarnya dari BPSDM ke Dinas Pendidikan ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dalam menyiapkan SDM bangsa yang andal dan luhur.

“Nah, yang sekarang ini sedang kita siapkan adalah bagaimana anak anak SMP bersiap menyongsong Indonesia emas 2045. Kalau mereka sekarang ini usianya ada yang 15, 16, 17, mereka akan masuk pada Indonesia emas

kemungkinan pada usia 35 – 40,” kata Khofifah.

Oleh karena itu, lanjutnya, menyiapkan generasi untuk Indonesia emas tidak hanya sekedar kurikulum dari mengandalkan kurikulum dari kementerian, tapi juga kearifan lokal dan karakter untuk mendukung kebhinekaan dan kekuatan Indonesia. “Sehingga saya minta untuk tancap gas untuk transformasi,” sambungnya.

Khofifah juga berpesan pada kepala BPSDM, dimana saat itu sudah menjadi nomer satu dari seluruh lembaga di Indonesia yang mengelola sumber daya manusia. “Saya yakin bahwa kepala BPSDM yang baru sudah bisa mengikuti kecepatan BPSDM yang sudah ada selama ini,” katanya.

Sedangkan untuk dr Fauzan, Wakil Direktur RSUD Saiful Anwar Malang, Khofifah meminta untuk harus menyiapkan dokter dengan kualifikasi pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dia mengharap adanya konfigurasi diantara Fakultas Kedokteran (FK) di berbagai perguruan tinggi dengan layanan kesehatan di rumah sakit.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim, Adhi Karyono menambahkan bahwa pelantikan pejabat eselon II ini adalah untuk mengisi kekosongan di beberapa jabatan. Di antara di Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. “Pejabatnya sudah memasuki masa pensiun dan bahkan sudah Pj, sehingga harus diisi,” tandasnya. (lut/dya)

MKD DPR RI Tekankan Etika Kehormatan Wakil Rakyat pada DPRD Jatim

SURABAYA – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun, menekankan masalah etika kehormatan tentang anggota dewan. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke DPRD Jatim, Selasa (20/6/2023).

Dalam kesempatan itu juga sebagai ajang silaturahmi dan menelaraskan kewenangan MKD dan BK. “Memang ada perbedaan kewenangan antara MKD dengan BK. Namun terus terang saja bahwa kita sedang menelaraskan, kewenangan-kewenangan BK sebaiknya seperti MKD. Karena bagaimanapun juga bahwa masalah-masalah proses suatu penegakan etika dan sebagainya, ada payung hukum yang perlu disinkronkan,” tegas Adang.

Secara khusus, pihaknya juga meminta ada atensi khusus dari Aparat Penegakan Hukum (APH) terlebih pada tahun politik seperti saat ini yang rawan berita bohong (hoaks). Karena saat ini sudah banyak surat kaleng yang disampaikan ke kepolisian dan kejaksaan.

“Artinya sebelum ada dua

kepastian dua alat bukti dan gelar perkara kalau yang bersangkutan bersalah, maka kami minta untuk tidak disebarakan terlebih dulu,” pinta Adang Dorajatun.

Sementara itu, selaras dengan apa yang disampaikan MKD DPR RI, Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jawa Timur mengatakan tengah menyusun draft tata tertib (tatib) baru untuk merevisi tatib lama yang sudah sekian tahun belum diperbarui. Nantinya draft tatib baru ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jatim untuk dibahas melalui panitia khusus (Pansus).

Anggota BK DPRD Jatim Prof Dr HM Noer Soetjipto mengatakan draft tatib yang baru naskah akademisnya telah selesai disusun. “Setelah dipansuskan, nanti ada beberapa masukan maupun kritikan untuk perbaikan kode etik. Sehingga setelah itu selesai bikin kode etik maka akan kita mintakan untuk pengesahan kepada pimpinan DPRD Jatim,” ujarnya.

Di antara materi dari draft tatib yang baru itu adalah selain

menyangkut hak-hak anggota DPRD Jatim juga tentang tata tertib yang meliputi kehadiran, disiplin, maupun persoalan-persoalan etika yang menimpa anggota DPRD Jatim.

“Artinya ketika ada isu-isu yang menimpa anggota kami maka akan kami panggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Sehingga sesuatu yang tidak benar dan belum jelas jangan sampai muncul surat kaleng atau lain sebagainya. Jangan sampai yang belum jelas tapi sudah di-justice. Kita sebagai BK akan bertindak secara profesional, tidak ada like and dislike, justru kita akan mencari solusi, agar apa yang menimpa teman-teman bisa selesai di ruang BK DPRD Jatim,” terang Noer Soetjipto.

Khusus menyangkut disiplin kehadiran mengikuti rapat paripurna untuk saat ini adalah minimal lebih



MKD DPR RI foto bersama dengan BK DPRD Jatim

dari 50 persen dari 120 anggota DPRD Jatim. Namun sejak pandemi Covid-19 kegiatan rapat paripurna dilakukan secara daring atau dibatasi jumlah anggota yang hadir.

“Harusnya saat ini kembali ke tataran awal. Apalagi Presiden Jokowi sudah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga harus kembali ke tataran umum dan sudah tidak ada kekhususan lagi,” tegas politikus asal Trenggalek ini. (lut/dya)



Artis
**DELIA
SEPTIANI**
JUALAN SAPI

Foto-foto : Instagram/deliaseptianti



tampil glamor, kini Delia memakai outfit sederhana namun tetap modis.

Ia mengenakan celana panjang hitam dipadu kemeja biru lengan panjang dan hijab menutup kepala.

Delia juga memakai sepatu dengan gaya sporty selama berada di kandang sapi.

"Jaga kandang lagii," tulis Delia melalui caption unggahan.

Bisnis Delia menjual hewan kurban ini memang selalu ia lakukan jelang Idul Adha.

Showroom sapi milik Delia diberi nama Soultan Ismail Farm. Showroom tersebut terletak di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Menurut Delia, ia hanya menjual sapi kelas premium untuk hewan kurban tahun ini.

Delia menjanjikan sapi-sapi miliknya diberi perawatan dan pakan terbaik sehingga punya kualitas tinggi.

Delia kemudian memperlihatkan salah satu sapi-sapinya yang punya ukuran paling besar.

Sapi tersebut ia beri nama Thor dan punya bobot hingga 1,1 ton. Sapi yang dijual Delia kebanyakan berjenis limousin dan simental.

Profil

Delia Septianti kelahiran, Jakarta 24 September 1990 pernah menjadi vokalis grup musik Ecoutez!. Delia mengawali kariernya dalam dunia

tarik suara saat dia bergabung dengan Trio Laris saat dia masih anak-anak.

Pada 2005, Delia bergabung dengan grup jazz Ecoutez!. Bersama Delia, grup ini menelurkan album pertamanya pada 2006 yang bertitel "Ekute".

Selain berkarier di dunia tarik suara, Delia juga pernah membintangi sinetron yang berjudul Bunga Perawan dan Gerhana.

Delia pernah membawakan acara Highlight Otomotif serta Kuis Moto GP yang tayang di TV 7.

Pada 2011, Delia hengkang dari Ecoutez! dan memilih untuk bersolo karier.

Lama tak muncul, penyanyi Delia Septianti kembali menghadirkan singel terbaru.

Delia menggandeng ayahnya, Mamo Agil yang juga keyboardist Usman Bersaudara sekaligus pencipta lagu anak berjudul "Abang Tukang Bakso".

Meski sempat terbentur pandemi Covid-19, tak membuat Delia dan ayahnya berdiam diri.

Keduanya kompak berkarya hingga menghasilkan lagu "Ada dan Tiada".

Menariknya, proses penggarapan lagu tersebut dibuat di rumah.

Kemudian, lagu "Ada dan Tiada" menurut Delia dan Mamo Agil bermakna dalam serta penuh refleksi (berbagai sumber)

DELIA Septianti artis kini miliki usaha sampingan jualan sapi. Meski jualan sapi, Delia tetap gaya dan modis saat layani pembeli.

Penyanyi, pemeran, dan pembawa acara ini menunjukkan aktivitas pekerjaannya di luar dunia hiburan.

Melalui akun Instagram-nya pada Sabtu (17/6/2023), Delia Septianti pamer profesi sampingannya sebagai penjual sapi.

Jelang Idul Adha pada akhir Juni

2023 mendatang, Delia tengah sibuk menjual sapi-sapi miliknya kepada orang yang ingin berkorban.

Mengurus sapi-sapi dagangannya, Delia tidak ragu turun sendiri ke kandang.

Dalam unggahan Instagram-nya, Delia terlihat menengok sapi-sapinya di kandang sambil turun tangan memberi pakan hingga memandikan mereka.

Jika di atas panggung ia selalu



TIM FARMASI INGATKAN FAKTOR RISIKO INFEKSI HIV

TIM FARMASI PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan faktor risiko infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Indonesia yang belakangan ini sering kali dibahas di media sosial.

Medical Dept. PT Kalbe Farma Tbk, dr. Johan Indra Lukito, menjelaskan penyakit infeksi yang disebabkan oleh HIV ini menyerang dengan cara melemahkan sistem imun tubuh manusia sehingga seiring waktu manusia tersebut akan semakin rentan terinfeksi berbagai macam penyakit virus, bakteri, maupun kuman lainnya.

Tidak hanya infeksi, Johan juga mengatakan infeksi yang disebabkan HIV juga bisa menyebabkan kanker.

"Proses penyebaran HIV sendiri terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh yang mengandung virus ini, terutama darah, cairan yang berasal dari alat kelamin dan dubur, melalui ASI (Air Susu Ibu), serta dapat ditularkan oleh ibu penderita HIV ke anak yang dikandungnya," kata Johan.

Virus HIV di dalam cairan dapat masuk ke dalam tubuh kemudian berkembang biak menjadi semakin banyak.

Proses itu biasanya memerlukan waktu selama satu sampai tiga bulan, hingga tiba pada satu waktu di mana jumlah virus HIV sudah sangat banyak dan tubuh untuk pertama kalinya membentuk antibodi terhadap virus HIV. Pada tahap itu sudah terjadi infeksi HIV.

Penyakit itu dapat menginfeksi semua kalangan, terutama yang berisiko tinggi terpapar virus HIV, seperti pada

penggunaan jarum suntik bekas pakai penderita HIV.

Virus dapat bertahan sekitar tujuh hari di dalam darah yang berada di dalam jarum suntik. Jika dibekukan atau didinginkan, virus bisa bertahan selama 42 hari.

Gejala yang pertama kali muncul mirip seperti flu, demam, tidak enak badan, lalu akan hilang dengan sendirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, virus terus berkembang biak dan semakin melemahkan imun tubuh.

Walaupun HIV belum bisa disembuhkan, namun, pengobatan berupa minum obat antiretroviral secara rutin seumur hidup dapat memulihkan imun tubuh sehingga pasien HIV mampu memiliki kualitas hidup yang tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak menderita HIV.

Selain itu, pengobatan anti-

retroviral juga bisa menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh sampai ke tahap tidak menularkan HIV lagi.

Johan menjelaskan pengobatan antiretroviral juga bisa dijadikan sebagai pencegahan.

Pertama, pencegahan pada orang yang mungkin sudah terpapar atau berisiko tinggi terpapar, baik sengaja maupun tidak sengaja, misalnya perawat yang tidak sengaja tersuntik jarum bekas pasien HIV, atau orang yang mendapat transfusi darah yang mengandung virus HIV.

"Dalam hal ini pengobatan antiretroviral sedini mungkin bisa mencegah mereka dari terinfeksi HIV," ujar Johan.

Kedua, untuk ibu hamil yang terinfeksi HIV, pengobatan antiretroviral selain bermanfaat untuk ibu, juga dapat mencegah terjadinya penularan dari ibu ke bayi yang dikandung.

Cara mendeteksi dan pengobatan HIV kini telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pemerintah juga telah memberikan dukungan terkait pembiayaan pemeriksaan dan pengobatan.

"Saat ini

tes deteksi HIV dapat dilakukan dengan cara yang mudah, serupa seperti tes deteksi Covid-19, seperti rapid test antigen atau antibodi, bisa dilakukan di rumah sakit bahkan juga di Puskesmas. Tes ini juga bisa ditanggung oleh BPJS," kata Johan.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan meminta kesadaran masyarakat untuk secara sukarela melakukan skrining HIV/AIDS, terutama bagi mereka yang melakukan aktivitas yang berisiko menularkan virus HIV.

"Agar ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk secara sukarela melakukan skrining. Siapapun boleh datang ke fasilitas layanan kesehatan untuk melakukan skrining," kata Anggota Tim kerja HIV dan PIMS Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes dr. Lanny dalam "Bimtek Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak dengan HIV/AIDS 2", beberapa waktu lalu.

Lanny menuturkan masyarakat yang tidak melakukan aktivitas yang berisiko menularkan virus, juga diperbolehkan untuk melakukan skrining.

Lanny mengatakan pada 2020, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) diperkirakan ada 543.100 orang di Indonesia.

Kemudian di tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 531.947 ODHA di Indonesia. (Ant)



PENGALAMAN JELAJAHI LUAR ANGKASA DI KENNEDY SPACE CENTER

SAAT memikirkan topik tentang penjelajahan luar angkasa, Anda pasti pernah memikirkan NASA.

Hal itu tidak mengherankan mengingat Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) memang ikonik. Melalui wahana yang diciptakan, NASA sering menjelajahi luar angkasa yang bikin takjub dunia.

Beberapa misi yang dikenal di antaranya Apollo 11, lalu ada juga Gemini, hingga yang terbaru ialah program Artemis.

Menariknya, sebagai masyarakat awam ternyata bisa menjajal pengalaman seolah-olah menjadi penjelajah luar angkasa di fasilitas yang disediakan oleh NASA yaitu dengan mengunjungi Kennedy Space Center Visitor Complex.

Begitu menjajal pengalaman sedikit lebih dekat dengan pekerjaan NASA tersebut di Kennedy Space Center Visitor Complex yang terletak di Tanjung Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.

Pada saat menjejakkan kaki ke dalam fasilitas tersebut, Anda akan disapa dengan taman khusus berisikan roket-roket yang pernah meluncur di misi-misi NASA.

Dinamakan sebagai "Rocket Garden", Anda bisa mengabadikan momen hingga mempelajari fakta-fakta menarik dari roket-roket yang dipamerkan.

Beberapa nama roket yang dipasang di taman tersebut di antaranya Roket Delta, Delta II, Juno, Juno II, Mercury-Redstone, Mercury-Atlas, Atlas-Agena, Saturn 1B, hingga Gemini-Titan II.

Anda bisa banyak mengabadikan momen di taman roket ini karena selain mengandung banyak sejarah,

roket-roket itu juga ditata secara estetik dan berhak menyabet gelar lokasi "instagramable".

Tak jauh dari atraksi yang membuat takjub pengunjung di pandangan pertama, ada juga atraksi bernama "Heroes and Legend".

Anda bisa berfoto dengan gambar besar dari kelompok Mercury 7 yang terdiri atas tujuh anggota astronot pertama pilihan NASA dan mereka digabungkan dalam proyek bernama Mercury.

Keseruan dari penjelajahan luar angkasa lainnya bisa didapatkan di atraksi terbaru Kennedy Space Center bernama "Gateway".

Beragam visual menarik baik yang diciptakan oleh teknologi hingga bagian dari wahana antariksa dipamerkan di "Gateway".

Di dalam "Gateway", pengunjung diajak berdecak kagum pada upaya dan pengembangan teknologi dari masa ke masa untuk bisa melakukan perjalanan ke luar Bumi.

Beragam tiruan produk untuk misi penjelajahan dan bukti sejarah wahana ruang angkasa dijajakan di tempat ini.

Ada beberapa wahana ruang angkasa yang pernah beroperasi dan dipamerkan di "Gateway", antara lain, kapsul Orion EFT-1 serta kapsul SpaceX Cargo Dragon COTS-2.

Tak tertinggal ada juga penampilan yang menyita perhatian di atas "Gateway" berupa pakaian astronot, pesawat luar angkasa Siera Space Dream Chaser, kapsul Starliner CST100

dari Boeing, hingga peluncur tahap pertama dari Roket Falcon 9 milik SpaceX.

Apabila sudah puas bermain-main di Gateway, Anda bisa menuju ke area belakang, ada atraksi lain bernama "Journey to Mars"..

Pengunjung bisa menjajal permainan dan simulator interaktif. Jangan lupa pula untuk menengok keluarga kendaraan penjelajah Mars yaitu Rover Family.

Mereka terdiri atas Sojourner Rover si penjelajah perintis, lalu ada Spirit and Opportunity Rovers yang berhasil memecahkan teka-teki 'adakah air di Mars?'

Curiosity Rover yang saat ini m a s i h

bertugas, hingga Perseverance Rover sebagai pen-jelajah generasi terbaru.

Di samping itu, masih ada beberapa atraksi lainnya seperti Apollo and Saturn V Center yang mengajak pengunjung untuk menegenal perjalanan dan penjelajahan ke Bulan.

Untuk menutup perjalanan seolah menjadi penjelajah ruang angkasa itu, Anda bisa membeli buah tangan berupa souvenir khas NASA yang tersedia di NASA Central.

Mulai dari oleh-oleh pakaian, aksesoris, hingga boneka tersedia di toko tersebut (Ant)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | MOJOKERTO: RAHMAD SURYADI | GRESIK-LAMONGAN: ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK: GATOT SUNARKO | TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI): IMAN SANTOSO, | MADIUN: IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | TRENGGALEK: ANNGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO | SEKERTARIS ISTIDHA NUR AMANAH, DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 03187854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal ke wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal ke wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MENJAGA KESEHATAN MATA SAAT LIBURAN

BEPERGIAN saat liburan memberikan dampak bagi kesehatan mata yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti udara kering, paparan sinar matahari, dan penerbangan jarak jauh.

Medical Daily, Senin (19/6/2023), memberikan kiat untuk menjaga kesehatan mata selama melakukan perjalanan liburan.

Mengenakan kacamata hitam. Mengenakan kacamata hitam dapat menghalangi cahaya matahari yang mengenai langsung ke mata.

Kacamata hitam selama perjalanan juga penting bagi penderita migrain dan sakit kepala akibat paparan sinar matahari.

Kacamata hitam bertindak sebagai penghalang yang melindungi mata dari angin, debu, dan kotoran lainnya serta mencegah iritasi mata dan goresan pada kornea.

Kacamata hitam berkualitas tinggi dapat memberikan proteksi 100 persen dari sinar UV matahari yang berbahaya bagi mata.

Menyiapkan kacamata renang. Jika berencana akan berenang saat liburan, sebaiknya sediakan dan kenakan kacamata renang saat berenang.

Mengenakan kacamata renang dapat melindungi mata dari klorin, air asin, atau kotoran selama berenang, yang dapat menyebabkan iritasi dan rasa tidak nyaman pada mata.

Membawa obat tetes mata. Paparan udara kering dan angin dapat membuat mata menjadi kering. Untuk mengurangi rasa tidak nyaman dan gatal akibat mata kering, dianjurkan untuk membawa obat tetes mata.

Minum air yang cukup juga dapat membantu mencegah mata kering akibat dehidrasi. Bagi pengidap alergi pada mata, selalu sediakan obat mata khusus saat melakukan perjalanan

liburan.

Menghindari penggunaan lensa kontak. Sebaiknya hindari penggunaan lensa kontak dan beralih ke kacamata saat melakukan perjalanan jauh karena lensa kontak dapat membuat mata menjadi lebih kering.

Jika perlu menggunakan lensa kontak selama perjalanan jauh, pastikan untuk menjaga kebersihannya dan kenakan dengan baik dan rapi. Lepas lensa kontak jika ingin berenang atau mandi.

Menghindari penggunaan riasan mata. Riasan berlebihan pada area mata dapat berisiko menyebabkan infeksi mata karena dapat menarik debu dan kotoran.

Oleh karena itu dianjurkan untuk tidak menggunakan riasan mata saat pergi liburan agar kebersihan mata tetap terjaga.

Konsultasi dengan dokter. Jika mengalami gejala seperti iritasi mata, atau infeksi, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter daripada

menundanya sampai kembali ke rumah.

Penanganan medis lebih awal dapat mencegah berbagai risiko penyakit mata yang bisa memburuk bila terlalu lama diabaikan (Ant)



KPK Tersandera ... (dari hal 1)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mendalami soal temuan pungutan liar atau pungli yang terjadi di rumah tahanan atau rutan KPK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan perihal temuan itu.

"Tentu (kami akan) transparan, nanti kami akan umumkan tersangkanya," kata Asep kepada wartawan yang dikutip Selasa (20/6/2023).

Asep mengatakan, saat ini pihaknya sudah memintai keterangan kepada kurang lebih 20 orang untuk mendalami persoalan tersebut. "Semua yang terindikasi tindak pidana korupsi termasuk di KPK itu sendiri, KPK tidak akan pandang bulu untuk melakukan upaya penegakan hukum," kata Asep.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) temukan adanya praktik pungutan liar atau pungli di dalam Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, temuan itu didasari atas inisiatif penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya karena mendengar adanya kabar soal pungli tersebut.

"Benar, dewan pengawas menemukan dan membongkar kasus terjadinya pungli di Rutan KPK, untuk itu dewan pengawas telah menyampaikan kepada pimpinan KPK agar ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan," kata Tumpak saat konferensi pers di Gedung Dewas KPK, Senin (19/6/2023).

Tumpak mengatakan, temuan Dewas KPK ini terdapat dua unsur yang bisa diselidiki lebih lanjut yakni dugaan pelanggaran etik dan unsur pidana. "Ini sudah merupakan tindak pidana, melanggar Pasal 12 huruf c, UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2021. Selanjutnya tentunya dewan pengawas juga akan memeriksa masalah etiknya," kata Tumpak.

Di tempat yang sama, Anggota Dewas KPK Albertina Ho menjelaskan, praktik pungutan liar yang ditemukan oleh pihaknya itu nominalnya mencapai Rp 4 miliar terhitung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. "Ini murni temuan dewan pengawas, tidak ada pengaduan. Pungutan liar yang dilakukan terhadap para tahanan yg ditahan di rutan KPK," kata Albertina.

Albertina mengaku, temuan itu sudah disampaikan kepada pimpinan KPK sejak 16 Mei 2023 lalu untuk ditindaklanjuti unsur pidananya. "Kami juga sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi, nanti setelah selesai klarifikasi semua tentu saja hasilnya akan diberitahu secara transparan," kata Albertina.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya juga mengatakan, "Ini yang masih terus kami dalam lebih lanjut. Karena secara SOP kerja-kerja rutan di KPK itu sangat ketat. Makanya kami dalam apa yang kemudian diberikan, jasa dalam tanda kutip yang diberikan kalau kemudian betul ada dugaan pidananya," katanya di Gedung

Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Ali mengatakan pengawasan di rutan-rutan KPK sedianya telah dilakukan secara ketat. Pihaknya juga tengah mengusut dugaan adanya keterlibatan pihak eksternal di balik praktik pungli di rutan.

"Termasuk juga pendalaman apakah ada pihak lain di luar KPK yang memanfaatkan situasi ini. Dalam pengertian dia ikut turut serta misalnya membantu sehingga beberapa pihak di luar itu memberikan sejumlah uang dan masuk ke oknum pegawai KPK," ujar Ali.

Sejauh ini belum ada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus pungli rutan KPK. Ali mengatakan penyelidik masih berfokus mencari unsur pidana dari peristiwa tersebut. "Pendalamannya apakah gratifikasi ataukah suap atau pemerasan, kita lihat nanti. Kalau gratifikasi pemberi tidak (ditindak), kalau pemerasan hanya pelakunya aja. Pemerasan dalam jabatan itu ada ya, itu masuk dalam UU korupsi. Kecuali suap kalau suap kan ada meeting mind ada pertemuan transaksi antara pemberi dan penerima dan kemudian apa yang diberikan. Ini yang masih kamu dalam," tutur Ali.

Ali mengatakan pihaknya juga telah melakukan perbaikan usai dugaan pungli terjadi di Rutan Merah Putih KPK. Sejumlah pegawai rutan di lokasi telah dilakukan rotasi. "KPK juga langsung melakukan rotasi dari beberapa pegawai rutan cabang KPK untuk memudahkan pemeriksaan-pemeriksaan oleh penyelidik KPK. Kami lakukan itu sebagai perbaikan sistem manajemen di Rutan KPK," jelas Ali.

Dari sejumlah rotasi pegawai rutan itu, posisi Kepala Rutan (Karutan) KPK tidak ikut menjadi bagian yang turut dirotasi. Jabatan Karutan saat ini diemban oleh Achmad Fauzi "Yang dilakukan rotasi-rotasi sepanjang informasi yang kami peroleh itu tidak sampai ke level Karutan ya," pungkas Ali.

Cerita Buruk Pelecehan

Belum usai satu masalah, muncul guncangan baru. Pegawai KPK diduga melontarkan kalimat seksisme kepada wartawan yang sedang meliput pemeriksaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Pegawai tersebut melontarkan kalimat: "Kalau ini cewek semua, enak euy".

Ucapan tersebut dilontarkannya saat awak media tengah berdesak-desakan berebut gambar dan pernyataan Syahrul Yasin Limpo. Momen tersebut terjadi di Gedung C1 KPK atau Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Kejadian itu bermula saat Syahrul Yasin Limpo keluar dari Gedung KPK C1. Pegawai KPK yang memakai kemeja biru lengan pendek itu terlihat sudah mengawal Syahrul sejak dari dalam gedung. Syahrul kemudian keluar dan meladeni pertanyaan wartawan. Pengawalnya dan juga pegawai KPK mengawal Syahrul hingga masuk ke dalam mobil sambil berdesakan.

Wartawan terus mengikuti Syahrul sampai di depan mobilnya yang berada di parkir dekat gerbang keluar. Awak media saling berdesakan untuk mengabadikan momen dan mencoba bertanya ke Syahrul Yasin Limpo. Di tengah-tengah desakan tersebut, pegawai KPK yang ikut dalam kerumunan dan melontarkan kalimat yang diduga pelecehan verbal itu. Bahkan, ucapannya itu terekam video wartawan.

Kalimatnya itu sontak memicu marah wartawan dan mengejar pegawai untuk meminta pertanggung jawaban. Pegawai KPK itu sempat balik emosi dan tidak mengakui bahwa dirinya telah melontarkan kalimat seksisme itu.

"Pak, itu pelecehan tahu," kata wartawan.

"Kalau cewek semua enak maksudnya apa?" imbuhnya.

"Bukan gua," kata pegawai KPK itu.

"Lu yang ngomong!" timpal

wartawan lain.

Peristiwa ini sempat memicu keributan. Petugas KPK itu kemudian dibawa masuk ke dalam gedung.

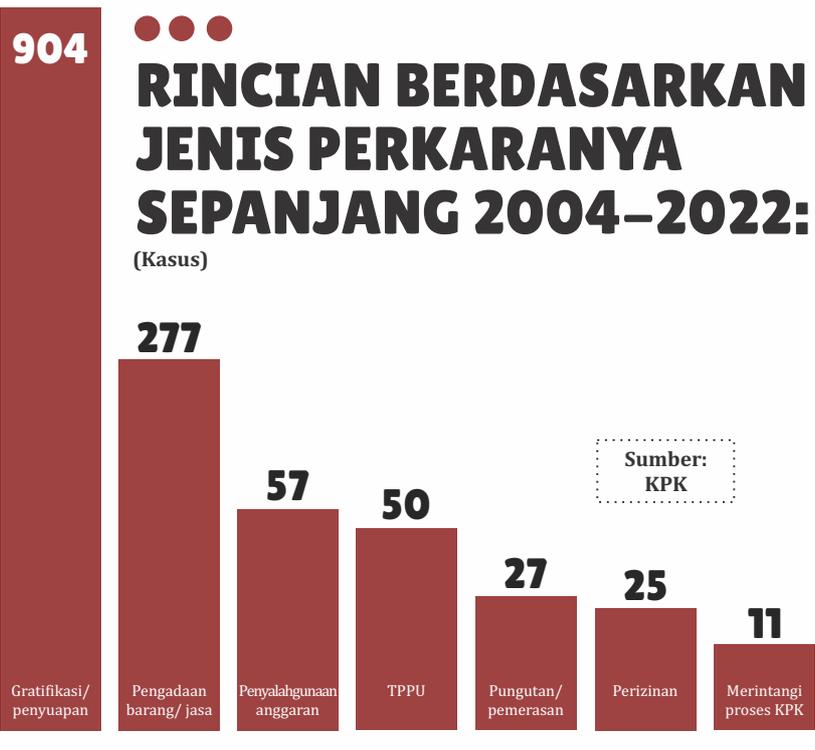
Secara terpisah Plt juru bicara KPK Ali Fikri meminta maaf atas perbuatan pegawai tersebut. Namun, belum diketahui identitas sang pegawai itu "Pada prinsipnya kami meminta maaf kepada teman-teman, kalau kemudian ada kejadian di luar yang tidak dimungkinkan," kata Ali.

"Setelah ini kami akan melakukan pertemuan dengan teman-teman jurnalis, kemudian dengan petugas KPK itu sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan meminta agar dugaan pungli dan temuan lain di KPK segera ditindaklanjuti. Menurut Hinca, pungli tersebut jelas-jelas melawan hukum yang berdampak buruk terhadap masyarakat Indonesia. "KPK menindaklanjutinya sesegera mungkin dan memastikan apakah perilaku buruk yang melawan hukum itu terjadi, dan tindakan untuk itu segera dilaksanakan atau ditegakkan hukum di situ," ujar Hinca di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Menurut Hinca, perilaku korupsi terbuka peluang terjadi di mana-mana termasuk di KPK. Dia menilai hal serupa terjadi dalam kasus narkoba di mana aparat bisa terlibat. "Saya kira yang namanya korupsi, kejahatan-kejahatan seperti ini, narkoba dan lain-lain ya bisa saja menyentuh mana saja. Tinggal tergoda atau tidak yang digodanya, begitu ya," tandas Politikus Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Hinca meminta Dewan Pengawas KPK bisa membeberkan temuan pungli itu kepada KPK secara tuntas. Dia mengingatkan KPK agar transparan dalam mengungkap temuan tersebut. "Bagus juga kalau KPK-nya menyebutkan atau menyampaikan hal-hal yang lebih detail lagi supaya publik juga mendapatkan informasi yang cukup," pungkas Hinca. (wid,rls,ist, ant, kum/dya)



BPK Bongkar 3 Permasalahan Pemindahan IKN

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam proses persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini terbongkar saat Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 diserahkan ke DPR, Selasa (20/6/2023). Diketahui, ada tiga permasalahan yang ditemukan BPK dalam proses persiapan itu.

Pertama, mengenai penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi yang belum dilaksanakan secara memadai, serta peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 belum lengkap. Akibatnya, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara belum dapat dilaksanakan dengan optimal, sebagaimana dikutip dari IHPS II-2022.

Kedua, pembagian tugas dan fungsi Tim Transisi serta Tim Pendukung belum diatur secara jelas, Tim Transisi dan Tim Pendukung pelaksanaan tugas Tim Transisi belum melaksanakan tugas sesuai Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022 secara menyeluruh, dan Tim Transisi belum menetapkan program/rencana kerja dan target secara lengkap.

"Hal ini mengakibatkan tujuan pembentukan Tim Transisi dan tim-tim pendukung pelaksanaan tugas Tim Transisi berisiko tidak tercapai secara maksimal, dan kinerja Tim Transisi/OIKN tidak dapat diukur karena program/rencana dan target kerja belum ditetapkan secara menyeluruh," tulis BPK dalam IHPS.

Adapun permasalahan ketiga terkait kesiapan OIKN untuk beroperasi dalam memenuhi mandat UU Nomor 3 Tahun 2022 belum didukung dengan kelengkapan kelembagaan, yaitu pemenuhan personel OIKN belum lengkap dan belum terdapat Peraturan Kepala OIKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah OIKN beroperasi. "Hal ini mengakibatkan operasional OIKN pada akhir 2022 berisiko terhambat," sebagaimana dikutip dalam IHPS II-2022.

Terhadap tiga temuan itu, BPK pun memberikan sejumlah rekomendasi, pertama merekomendasikan Kepala OIKN/Ketua Tim Transisi untuk melakukan monitoring atas kelengkapan regulasi secara jelas dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat memenuhi kebutuhan regulasi yang perlu segera disusun.

Lalu, menetapkan uraian tugas dan wewenang untuk setiap jabatan pada Tim Transisi/Tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OIKN, menetapkan rencana kerja Tim



Perkembangan proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajam Pasert Utara, Kalimantan Timur. (dok.ant)

Transisi/Tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OIKN berikut target kinerja dan indikator keberhasilannya, serta menginstruksikan Sekretaris OIKN/Tim Transisi untuk memonitor pelaporan Tim Transisi/Tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OIKN secara periodik.

Terakhir, BPK merekomendasikan Kepala OIKN untuk menetapkan peraturan terkait koordinasi atas pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh K/L/Pemda, antara lain terkait pengadaan kekhususan oleh K/L/Pemda.

Gaduh Rencana Pengawas Bule

Di sisi lain, pemerintah berencana menggunakan pengawas bule untuk

mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di tengah wacana itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tetap mengutamakan pekerja lokal untuk menggarap proyek IKN Nusantara.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan pelatihan dan sertifikasi para pekerja konstruksi di Indonesia. Khusus IKN, pada 2023 ini ditargetkan ada 8.500 tenaga kerja konstruksi telah dilatih dan tersertifikasi.

"Penggunaan pekerja lokal jadi concern kami. Tren di IKN, kami sudah melakukan pelatihan di IKN hampir 2.739 orang tenaga kerja di IKN yang

sudah kita latih," kata Rachman saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (20/6/2023).

Rachman belum bisa menjabarkan detail tentang rencana pemerintah menggunakan pengawas asing IKN, baik jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan hingga akan memegang proyek apa saja. Ia mengaku belum mendapatkan detailnya. Yang pasti, PUPR saat ini berupaya agar kualitas pekerja konstruksi Indonesia bisa setara dengan tenaga kerja asing di IKN nanti.

"Sebenarnya pada saat pelatihan hampir semua aspek kita latih, SDM perencana, SDM pengawas juga kita latih," tegas Rachman.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi, Dewi Chomistriana, menjelaskan penyetaraan kualitas tenaga kerja tersebut dilakukan baik dalam hal kualifikasi maupun klasifikasinya.

"Penyetaraan baik kualifikasi dan klasifikasinya yang dilakukan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. Kita tetap perhatikan kualifikasi dan klasifikasi di lapangan. (Kewajiban transfer pengetahuan) juga termasuk," tutur Dewi.

Dalam RDP bersama Komisi V DPR RI hari ini, Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan kritik karena kualitas tenaga kerja konstruksi di Indonesia belum bisa memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan saat ini. Sehingga dibutuhkan tenaga kerja asing untuk mengawasi pembangunan IKN. "Kita akan berupaya untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi sehingga sejajar kapasitasnya dengan tenaga kerja asing," tutur Dewi. (wid,rls,ant/dya)

